

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan proses pembentukan dan perubahan yang sangat panjang, sebelum adanya Kemerdekaan para *Founding Fathers* telah mendiskusikan terkait negara dan elemen didalamnya dengan proses yang sangat panjang mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) hingga pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai dengan pembahasan bentuk negara yang tak ayal dengan perdebatan yang sangat kompleks. Dalam dokumen masa reses terdapat 17 orang yang mengusulkan bentuk Uni dan 4 orang mengusulkan bentuk Federal dimana jika kita pahami *Uni* atau *Eenheidsstaat* merupakan nama lain dari Negara Persatuan yang berkembang menjadi Negara Kesatuan.¹ Mengingat Indonesia merupakan negara yang terdiri atas 17.504 pulau yang tersebar di seluruh bagian negara.² Maka dari itu Indonesia sepakat untuk menjadi Negara Kesatuan sebagai bentuk dari negara, hal ini dengan jelas tertera pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan,

¹ RM.A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 177

² Kata Data, “Berapa jumlah pulau di Indonesia?”, 16 Oktober 2018, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia>, diunduh 29 April 2019, pukul 06.30

yang berbentuk Republik”. Selain membahas terkait dengan bentuk dari negara para *Founding Fathers* tak lupun membahas terkait dengan Lembaga Perwakilan yang salah satunya disepakati untuk adanya Badan Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen yang berbunyi “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Hal-hal yang sebelumnya telah dirancang dan sepakati oleh para *Founding Fathers* tersebut pada perkembangannya terdapat beberapa hal yang diperkuat namun ada juga yang dalam perkembangannya berubah dengan adanya amandemen. Salah satu hal yang dipertahankan dan diperkuat ialah terkait dengan bentuk Negara Kesatuan yang ada di Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap dipertahankan dan kata “Kesatuan” yang perlu digaris bawahi di Pasal tersebut diperkuat dalam tubuh konstitusi, hal ini diwujudkan dan diperkuat pada Pasal 37 Ayat (5) Undang Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Penguatan ini ditujukan untuk menjamin berjalannya suatu tujuan dari bentuk negara. Diperkuat pula dengan Pasal lainnya, yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Ketentuan tersebut menunjukan ataupun menggambarkan Desentralisasi Teritorial, atau bisa dikatakan desentralisasi kekuasaan bukan setralisasi.³ Dari pasal inilah yang mendasari diberikannya kewenangan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri atau otonomi daerah namun tetap poros utama dalam pemerintahan suatu bangsa adalah pada pusat. Indonesia sejauh ini memiliki daerah otonom sejumlah 415 kabupaten dan 93 kota yang terdiri atas 34 Provinsi.⁴ Untuk itu dalam melancarkan komunikasi dan hubungan pemerintahan diperlukannya jembatan penghubung diantaranya, maka daripada itu diperlukannya lembaga yang bertugas untuk memenuhi hal ini. Seperti yang diketahui dalam Pemerintahan yang dianut di Indonesia menggunakan sistem *Trias Politica* dimana dalam pembagiannya dibuat 3 (tiga) bagian wewenang yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dari ketiga bagian wewenang tersebut Legislatif yang menjadi corong perwakilan yang dirasa tepat sebagai jembatan penghubung tersebut. Sedangkan terkait dengan MPR yang didalamnya terdiri atas DPR, Utusan Daerah, dan golongan mengalami perubahan yang sangat signifikan, terlihat dari setiap periodenya setiap utusan daerah (daerah swatantra

³ Abby Yuhana, 2009, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Bandung : FOKUSMEDIA, hal. 11

⁴ Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, Dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014, http://otda.kemendagri.go.id/total_daerah_otonom.pdf, diunduh Senin, 29 April 2019, pukul 05.00

tingkat 1) mengalami penambahan dimulai dari periode tahun 1959 hingga 1981 dengan patokan dari jumlah penduduk di tiap provinsinya, hingga terakhir di periode tahun 1981 utusan daerah yang ada di MPR sejumlah 140 orang yang dipilih oleh DPRD dari tiap Provinsi.⁵ Hingga akhirnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah melakukan beberapa kali Amandemen yang diantaranya merubah terkait dengan hal MPR itu sendiri. Salah satu perubahan yang menjadi perubahan yang sangat besar adalah terkait dengan kelembagaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mana sebelumnya merupakan Lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi sebagai pemangku kedaulatan rakyat yang terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditambah dengan utusan-utusan daerah-daerah dan golongan-golongan, dengan diiringi tugas dan kewenangan yang sangat besar MPR dirasa sebagai lembaga dengan *super power*. Hal tersebut berubah pada Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana MPR menjadi Perwakilan dua kamar yang menunjukkan bahwa dalam satu badan perwakilan terdiri dari dua unsur yang sama-sama menjalankan segala wewenang badan perwakilan.⁶ , tepatnya pada perubahan ketiga yang dimana terkait Utusan Daerah yang sebelumnya ada di dalam kelembagaan MPR dijadikan suatu lembaga yang baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertera pada Pasal 22C dan

⁵ RM.A.B. Kusuma, *Op.cit*, 2004, hal. 77-85

⁶ Bagir Manan, 2004, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta : FH UII Press, hal.4

22D. Salah satu gagasan dibentuknya lembaga ini ialah untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan negara, serta dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem Utusan Daerah di MPR yang pada aturan sebelumnya keikutsertaan daerah dalam Utusan Daerah di MPR (selama Orde Baru hanya dua kali dalam lima tahun).⁷ Dikarenakan adanya lembaga ini secara langsung terlihat bahwa para pembuat peraturan sedang membagai Representative dalam negara Indonesia, yakni DPR sebagai *Representative* Politik dan seluruh rakyat, dan DPD sebagai *Representative* Daerah. Terlihat pada Pasal 22 D yang menjelaskan dengan jelas akan tugas dan wewenang dari DPD itu sendiri sepenuhnya untuk membantu majunya daerah perwakilannya, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut ;

Pasal 22D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undnag yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan

⁷ *Ibid*, hal. 60

sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undnag-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undnag-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Membahas tentang Utusan Daerah yang sebelumnya ada di dalam MPR dan sekarang menjadi Lembaga tersendiri yang dinamakan DPD adapula salah satu hal yang berubah pula terkait dengan pemilihan anggotanya yang berangkat ke pusat, dalam Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”

hal ini menunjukkan jika sistem pemilihan anggota dari DPD dilakukan dengan pemilihan umum, Pasal ini diperkuat dengan Pasal 22E Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana berbunyi;

Pasal 22E Ayat (1)

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”

Pasal 22E Ayat (4)

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”

Selain itu pada Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.” Bunyi pasal tersebut serupa dengan yang tertera di Pasal 22E Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi dari Pasal tersebut dikatakan jika Pemilihan Anggota DPD dilakukan dengan pemilihan Umum yang langsung dipilih oleh Rakyat provinsi yang bersangkutan yang memilih perseorangan yang nantinya menjadi wakil untuk ke pusat. Berbeda dengan pemilihan Utusan Daerah yang sebelumnya ada di MPR yang dipilih dengan hasil permusyawaratan DPRD Provinsi bersama Gubernur. Hal ini dirasa sangat proporsional saat itu lantaran Pemerintah Daerah yang notabene telah dipilih oleh rakyat akan memilih wakil Utusan Daerahnya dari sisi

profesionalisme dalam keilmuannya yang diharapkan akan membantu memajukan daerah, membantu menyelesaikan permasalahan di Daerah dan menjadi Perwakilan suara Daerah dalam menentukan keputusan di tubuh MPR itu sendiri, bukan dari hanya sekedar populer, menguasai massa, atau menguasai infrastruksi politik yang notabene merupakan resiko dari pemilihan umum dalam hal mutu wakil.⁸ Selain itu, keberadaan DPD dimaksudkan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah dengan membawa permasalahan/*issue* yang ada di daerah menjadi suatu permasalahan/*issue* Nasional. Jadi dapat dikatakan DPD juga merupakan bentuk pengakomodasian kepentingan-kepentingan daerah untuk dihubungkan ke Pusat.⁹ Dengan adanya perbedaan pemilihan anggota hingga adanya perubahan saat ini, lalu muncul pertanyaan terkait dengan Fungsi dari “Utusan Daerah” yang sebenarnya. Apakah Fungsi “Utusan Daerah” dalam DPD yang sebenarnya, apakah menjadi sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah atau menjadi lembaga perwakilan daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Kritis Pergeseran Fungsi Utusan Daerah Dalam Dewan Perwakilan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

⁸ *Ibid*, hal. 63

⁹ Khamami Zada, “Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm, 26-27

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini Penulis memberikan batasan dan perumusan masalah Apakah DPD sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah atau sebagai lembaga perwakilan daerah jika melihat dari fungsinya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif (tujuan terkait dengan masalah penelitian), yaitu :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pergeseran fungsi utusan daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi saat ini.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana konsep yang ideal dalam tubuh Dewan Perwakilan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tujuan Subyektif (tujuan yang terkait dengan kepentingan subyek penelitian), yaitu :
 - a. Sebagai penambah pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan fungsi Utusan Daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Sebagai langkah berpikir kritis menemukan konsep ideal yang sesuai dengan konstitusi dalam fungsi Utusan Daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah sebagai pertimbangan dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan penelitian skripsi yang penulis lakukan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan Fungsi Utusan Daerah dalam Dewan Perwakilan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beberapa tahun belakang timbul kesenjangan terkait dengan Fungsi tersebut dengan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan sumbangsih kepada penegak hukum dalam memperkuat peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal fungsi Utusan Daerah dalam pemilihan Dewan Perwakilan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah ketidakjelasan penafsiran yang berkembang di masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik” hal ini merangkan jika Indonesia merupakan negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang dimana

didalam sebuah negara terdiri dari daerah-daerah, yang selanjutnya dalam perkembangan di Indonesia daerah ini disebut daerah otonom yang memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya, Namun tetap kekuasaan perintah sesungguhnya ialah Pemerintah Pusat. Terkait dengan kata “Kesatuan” yang perlu digaris bawahi di Pasal 1 ayat (1) tersebut memiliki korelasi dengan Pasal selanjutnya, yakni Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Dikarenakan adanya kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan masih adanya tetep Pemerintah Pusat disuatu Negara maka diperlukan suatu jembatan penghubung diantara. Maka daripada itu diperlukannya perwakilan-perwakilan dari tiap daerah sebagai penghubungnya.

Dalam hal perwakilan-perwakilan daerah yang dikirim ke pusat sebenarnya telah ada dalam lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni terlihat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen yang berbunyi “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang” terlihat adanya “utusan-utusan dari daerah” dalam isi

pasal tersebut. Namun perkembangan konstitusi Indonesia dalam upaya perkembangan hukum dilakukan dengan sangat progresif saat itu, hingga akhirnya pada Amandemen atau perubahan ketiga terkait dengan “utusan daerah” yang sebelumnya ada di tubuh MPR berubah tepatnya pada Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan tentang adanya lembaga perwakilan yang menjadi *representative teritorial* atau daerah yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang mana pada isi pasalnya berisi isi dan wewenang dari DPD itu sendiri, yakni sebagai berikut;

Pasal 22C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22D

- (5) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undnag yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (6) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (7) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (8) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Dari pasal tersebut terlihat bahwa perwakilan daerah dalam DPD memiliki tugas wewenang yang sangat pokok dalam hubungan pusat ke daerah begitupula sebaliknya. Kedua pasal diatas sama-sama mengatur terkait keterwakilan daerah namun yang membedakan adalah terkait dengan proses pemilihan wakil daerah atau konsep utusan daerah dari kedua pasal tersebut. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum Amandemen yang mengatur tentang MPR, “utusan-utusan dari daerah-daerah” dipilih oleh Gubernur dan DPRD Provinsi, sedangkan dalam Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 anggota DPD dipilih dengan pemilihan umum oleh rakyat. Terlihat pula pada Pasal **22E Ayat (4) yang berbunyi** “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan”. Selain itu pada Pasal 181 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.” Kedua pasal tersebut sama mengatur terkait peserta anggota DPD adalah perseorangan.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penulis mempergunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan

pendekatan yang dipergunakan penulis untuk menganalisis Pergeseran Fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah yang sebenarnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pergeseran fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya, yakni dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang terdiri dari buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain;

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008
- g) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
- h) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan

Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Daerah

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan. Yakni dengan mencari dan menginventarisasi dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Utusan Daerah, dan konsep kesatuan.

5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data secara normatif kualitatif yaitu metode yang sifatnya deskriptif dan menggunakan analissi dengan berlandaskan teori yang bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORITIS DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Hukum Kritis

B. Tinjauan Umum tentang Konsep Negara Kesatuan

C. Tinjauan Umum tentang Demokrasi

D. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran